



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Jusmaya binti Satullah**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Dusun kalumpang Desa Tri Tiro, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **BAKRI, SH.** Pekerjaan Pengacara/Advokat, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa, Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2017;  
melawan

**Bambang Iswahyudi bin Abd. Rajab**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komp. PKG Jalan Kelapa Nomor 12, Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 168/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 17 Maret 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016 di Dusun Kalumpang Desa Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Blk



akta Nikah Nomor 0155/23/IX/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba ;

2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucpkan pula Sighat Taklik Talak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dirumah penggugat dan tergugat selama kurang lebih 5 bulan dan tidak karuniai anak.
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan Terguga sering cemburu dan Tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa diketahui tujuannya setelah kembali terkadang marah sambil berkata kamu itu Perempuan Pere.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2016 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan Tergugat tetap tidak meroba sikapnya bahkan Tergugat marah dan sambil berkata saya ceraikan dan kamu itu Perempuan Pere sehingga Penggugat malu dan menderita lahir dan batin
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat kembali ke rumah orang keluarganya di taccorong dan membawa pakaiannya dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang selain itu tergugat tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sekarang telah berpisah selama kurang lebih empat bulan sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang sehingga Penggugat tinggal menderita lahir dan batin.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan Tergugat maka Penggugat berkesimpulan yaitu dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba .
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat , maka Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Bik



pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

- Menyatakan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat Bambang Iswahyudi bin Abd.Rajab terhadap Penggugat Jusmaya binti Satullah
- Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terahir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau/Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

#### **Tentang Kehadiran Pihak-pihak**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 168/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 12 April 2017 dan tanggal 12 Mei 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

#### **Tentang Perdamaian**

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Blk



### **Tentang pemeriksaan dan pembuktian**

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/23/IX/2016, tanggal 15 September 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasmirawati binti Alimuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalumpang Selatan, Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat sekaligus bertetangga sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat selama 3 bulan, dan belum dikaruniai anak ;
  - Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar mulut ;
  - Penyebabnya karena Tergugat telah membohongi Penggugat bersama keluarganya, karena pada waktu Tergugat melamar Penggugat, Tergugat menyanggupi permintaan orangtua Penggugat yaitu berupa uang belanja sejumlah Rp. 40.000.000 dan dibayar tunai. Namun kenyataannya pada waktu uang belanja tersebut diserahkan, Tergugat hanya menyerahkan uang belanja sejumlah Rp. 15.000.000.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



- Saksi pernah dengar Tergugat mengatakan bahwa ia akan melunasi sisa uang belanja yang belum dibayar ;
- Setahu saksi uang belanja tersebut terpaksa diterima karena undangan sudah beredar ;
- Saksi tahu jumlah uang belanja karena saksi hadir pada waktu keluarga Tergugat menyerahkan uang belanja ;
- Penyebab lain pertengkarnya karena Tergugat selalu cemburu kalau ada laki-laki yang ditemani bicara Penggugat meskipun itu keluarga Penggugat sendiri, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya, dan kalau pulang ke rumah, Tergugat sering marah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat adalah perempuan Pere (murahan) sehingga Penggugat merasa malu
- Saksi biasa melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang sudah pisah selama 4 bulan lamanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengunjungi Penggugat ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

2. **Sumarni binti Saleh**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kalumpang Utara, Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kemenakan Penggugat juga bertetangga, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat ;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat telah membohongi Penggugat bersama keluarganya karena pada waktu Tergugat melamar Penggugat, Tergugat menyanggupi permintaan orangtua Penggugat berupa uang belanja sejumlah Rp 40.000.000 dan dibayar tunai, namun kenyataannya pada waktu penyerahan uang belanja, ternyata uang tersebut hanya sejumlah Rp. 15.000.000 ;
- Pada waktu penyerahan uang belanja, saksi dengar Tergugat akan melunasi sisa uang belanja yang belum dibayar setelah menikah ;
- Uang belanja tersebut terpaksa diterima orang tua Penggugat karena undangan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah beredar ;
- Saksi melihat langsung penyerahan uang belanja dari keluarga Tergugat karena saksi hadir pada saat penyerahan uang belanja tersebut ;
- Penyebab lain terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu kalau ada laki-laki lain yang ditemani bicara Penggugat meskipun keluarga Penggugat sendiri, Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya, dan kalau pulang ke rumah, Tergugat sering marah dan mengatakan kepada Penggugat, bahwa Penggugat adalah perempuan pere (murahan) sehingga Penggugat merasa malu ;
- Saksi bisa melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga rumah ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016, hingga sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengunjungi Penggugat ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak memberikan keterangan lain ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

**Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Nomor 0155/23/IX/2016, tanggal 15 September 2016, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara**

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



## **Pertimbangan Mediasi dan Perdamaian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan pokok perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya dan kalau kembali terkadang marah dan berkata kepada Penggugat perempuan pere ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering cemburu dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya dan kalau kembali terkadang marah dan berkata kepada Penggugat perempuan pere ?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

#### **Penilaian alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Kasmirawati binti Alimuddin** dan saksi **Sumarni binti Saleh**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sering cekcok

Hal. **10** dari **18** hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Bik



dan bertengkar disebabkan sejak awal pernikahannya Tergugat membohongi Penggugat dan keluarganya mengenai jumlah uang belanja, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan kalau pulang, Tergugat marah dan berkata kepada Penggugat perempuan pere (murahan) ;

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, sejak bulan Nopember 2016 sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

#### **Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal pernikahannya Tergugat membohongi Penggugat dan keluarganya mengenai jumlah uang belanja, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan kalau pulang, Tergugat marah dan berkata kepada Penggugat perempuan pere (murahan);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, sejak

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



bulan Nopember 2016 sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sejak awal pernikahannya Tergugat membohongi Penggugat dan keluarganya mengenai jumlah uang belanja, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan kalau pulang, Tergugat marah dan berkata kepada Penggugat perempuan pere (murahan), *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 4 bulan lamanya, sejak bulan Nopember 2016 sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 4 bulan lamanya, sejak bulan Nopember 2016 sampai perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Bik



hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Bik



mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab ;

- Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

- Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Bik



Artinya: *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

*“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Penggugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.Bik



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Bambang Iswahyudi bin Abd. Rajab) terhadap Penggugat (Jusmaya binti Satullah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 H. oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. St. Husniati.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 274.000,00
- Redaksi	Rp 6.000,00
- Meterai	Rp 5.000,00

**Jumlah Rp 365.000,00**

**(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PA.BIK